



**RENCANA KERJA
KECAMATAN PONCOWARNO
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO
TAHUN 2024**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 83);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 Agustus 2023
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,


* AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Poncowarno ini merupakan kelanjutan Renstra Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dimana keduanya merupakan bagian yang integral dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen yang mana dalam penyusunannya Renja Kecamatan tetap mengacu kepada Renstra. Renja Kecamatan sendiri mendukung Visi dan Misi Kabupaten Kebumen. Di sisi lain Renja Kecamatan Poncowarno merupakan dasar dalam penyusunan KUA dan RKA. Kemudian menentukan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk satu tahun ke depan, dengan demikian akan mempermudah dalam menentukan arah dan tujuan sekaligus akan mempermudah dalam menilai atau mengevaluasi tingkat pencapaiannya.

Namun demikian, sebaik apapun rencana yang dibuat perlu sekali kerja sama semua pihak dalam pelaksanaannya, baik Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat. Tanpa adanya kerja sama yang saling mendukung dari semua komponen masyarakat tentu mustahil akan melaksanakan rencana-rencana yang telah disusun.

Untuk itu harapan kami supaya semua pihak dapat mendukung rencana ini baik itu dari pemerintah kabupaten sebagai pembina supaya dapat memfasilitasi baik dari segi pendanaan dan dari segi sumber daya manusia untuk selalu dapat membina OPD khususnya Kecamatan Poncowarno dalam pelaksanaan kegiatannya. Dan juga pihak swasta/pengusaha diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan dapat lebih bertanggung jawab sehingga hasil yang dicapai lebih maksimal serta masyarakat sebagai pemanfaat, pengawas dan pemelihara diharapkan juga lebih berperan aktif dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang ada.

Demikian dan semoga dokumen ini dapat menjadi bahan masukan serta informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (*decision maker*) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Kebumen, 7 Agustus 2023

CAMAT PONCOWARNO,



Julin, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19791221 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyusunan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONCOWARNO TAHUN 2022	6
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra sampai Tahun 2023	6
B. Kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno	18
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Poncowarno	21
D. Review Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Poncowarno	22
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	34
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen	34
B. Tujuan dan Sasaran Renja	35
C. Program dan Kegiatan	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	41
A. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten	41
B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024	42
BAB V PENUTUP	50
A. Catatan Penting.....	50
B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	50
C. Rencana Tindak Lanjut.....	51
Lampiran	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	8
Tabel 2.2	Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Poncowarno Tahun 2022	9
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Poncowarno dan Pencapaian Renstra Kecamatan Poncowarno s/d Tahun 2023	13
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	20
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kebumen	23
Tabel 2.6	Usulan Prioritas Kecamatan Tahun 2024 sebagai usulan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu Tahun 2024	32
Tabel 2.7	Daftar Usulan Prioritas Desa yang akan Diusulkan ke Perangkat Daerah Kecamatan Poncowarno Tahun 2024	33
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Poncowarno	36
Tabel 3.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Poncowarno Tahun 2024	39
Tabel 3.3	IKM Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026	40
Tabel 4.1	Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten	41
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Serta Prakiraan Maju Kecamatan Poncowarno Tahun 2025	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah (P1)
Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Poncowarno
- Lampiran 2 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Lampiran 3 Terdiri dari :
- Berita Acara Musrenbangcam Tahun 2022 beserta lampirannya
 - Daftar Hadir Musrenbangcam Tahun 2022
 - Dokumentasi Pelaksanaan Musrenbangcam Tahun 2022
 - Notulen Musrenbangcam Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen adalah dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Poncowarno, merupakan dokumen perencanaan pembangunan di Kecamatan Poncowarno sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Penyusunan Renja Kecamatan Poncowarno mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan di Kecamatan Poncowarno sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum dalam RKPD, serta menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 – 2026.

Kecamatan Poncowarno merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kebumen yang memiliki peluang yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi, karena memiliki potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang besar serta ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana informasi kelembagaan serta informasi yang relatif lengkap. Namun walaupun mempunyai peluang dan potensi yang lengkap tersebut, di dalam perspektif pembangunan ekonomi, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa Kecamatan Poncowarno masih sangat memerlukan upaya-upaya yang signifikan untuk mengakselerasi laju pembangunan dan pertumbuhan ekonominya.

Tata cara penyusunan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 juga mengacu kepada rancangan awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024, Renja SKPD digunakan sebagai dasar masukan dalam perencanaan periode satu tahun. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan visi Kabupaten Kebumen yaitu : *“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri Berakhlak Bersama Rakyat”*. Kemudian Misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Poncowarno adalah Misi ke-1 (satu) yaitu: *“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi”*.

Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 harus selaras/konsisten dengan target capaian

yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 dengan dokumen Renstra Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

B. Landasan Hukum

Rencana Kerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Poncowarno sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 83);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ((Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 ini adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Poncowarno untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Poncowarno.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Poncowarno selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Poncowarno Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Poncowarno Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2024.

D. Sistematika Penyusunan

Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Sistematika Penulisan
- Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023.
 - B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - C. Capaian Keuangan
 - D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - E. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
 - F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - A. Telaah terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah
 - B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - C. Program dan Kegiatan
- Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - A. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten
 - B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V. Penutup
 - A. Catatan Penting
 - B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
 - C. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONCOWARNO TAHUN 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sampai Tahun 2023

Rencana Kerja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 disusun berdasarkan atas analisis kondisi objektif permasalahan maupun capaian/keberhasilan yang diraih. Dari permasalahan dan keberhasilan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan Poncowarno saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Sedangkan capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan untuk bagaimana tetap mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Renja Kecamatan Poncowarno tahun lalu, yaitu Tahun 2022 dievaluasi sebagaimana juga amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Poncowarno untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian

dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja. Kegiatan yang diukur dari hasil capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator input, output dan outcome. Untuk indikator kinerja benefit dan impact telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2022 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Disamping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2022 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
	Tujuan				
	Mewujudkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00	87,69	105,65%
	Sasaran				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	85,00	86,53	101,80%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatkan pelayanan publik oleh kecamatan dengan indikator sasaran Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan memiliki target 85,00 sedangkan realisasi 86,53 dan persentase capaian kinerja tahun 2022 dengan hasil 101,80% masuk dalam kategori capaian Baik Sekali (BS).

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pada Tahun 2022 Kecamatan Poncowarno menjalankan 4 Program, 9 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dan anggaran yang disediakan sebesar Rp.2.072.130.000,00. Program/kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerja 92.94% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Poncowarno Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	10.962.600	99,66
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	5.980.100	99,67
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.982.500	99,65
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.738.391.000	1.605.995.365	92,38
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.719.391.000	1.587.531.555	92,33
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	19.000.000	18.463.810	97,18
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.739.000	33.220.500	98,46
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.750.000	1.741.000	99,48
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000	9.000.000	100,00
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	7.613.500	95,16
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000	2.250.000	100,00
9.	Penyediaan Bahan/ Material	7.089.000	6.993.000	98,64

10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000	4.000.000	100,00
11.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.650.000	1.623.000	98,36
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000	10.000.000	100,00
12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.750.000	63.054.941	90,40
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.750.000	44.079.441	86,85
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000	17.975.500	99,86
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.000.000	20.036.481	95,41
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.000.000	41.022.981	97,67
17.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	1.000.000	100,00
18.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	19.986.500	99,93
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	57.250.000	53.986.125	94,29
19.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	57.250.000	53.986.125	94,29

	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	21.750.000	21.595.000	99,28
20.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21.750.000	21.595.000	99,28
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	88.250.000	86.050.700	97,51
21.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.000.000	15.478.300	96,73
22.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.500.000	7.140.000	95,20
23.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.750.000	9.584.000	98,29
24.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000	19.897.400	99,48
25.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	30.000.000	29.313.500	97,71

26.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000	4.637.500	92,75
JUMLAH		2.072.130.000	1.925.888.212	92,94

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh Sub Kegiatan terlaksana dengan baik, meskipun secara keuangan terdapat capaian sub kegiatan yang tidak mencapai 100%, namun secara fisik 100% kegiatan dilaksanakan.

Adapun capaian pelaksanaan Renja sebagaimana Tabel 2.3 Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 dan pencapaian Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021–2026 sampai Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Poncowarno dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Poncowarno s/d Tahun 2023

Nama OPD : Kecamatan Poncowarno

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kec. Poncowarno) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023			
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(7+9)	11 = (10/4)		
7		Unsur Wilayah										
7	01	KECAMATAN										
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7	01	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	56 dokumen	0	11 dokumen	11 dokumen	100	11 dokumen	22 dokumen	39.28%
7	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	26 dokumen	0	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	10 dokumen	38.46%
7	01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	30 dokumen	0	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	12 dokumen	40%
7	01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	60 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40%
7	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	80 orang	0	16 orang	13 orang	81,25	16 orang	29 orang	36.25%
7	01	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	20 dokumen	0	4 dokumen	3 dokumen	75	4 dokumen	7 dokumen	35%

1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7	01	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	60 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40%
7	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (kabel, lampu, terminal, saklar)	20 paket	0	4 paket	4 paket	100	4 paket	8 paket	40%
7	01	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	60 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40%
7	01	01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40%
7	01	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40%
7	01	01	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bulan penyediaan bahan / material	60 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40%
7	01	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	40 orang	0	8 orang	8 orang	100	8 orang	16 orang	40%
7	01	01	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi arsip	60 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100	-	12 bulan	20%
7	01	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	26 unit	0	1 unit	1 unit	100	1 unit	2 unit	7.69%
7	01	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/ operasional	-	0	-	-	-	-	-	-
7	01	01	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	6 unit	0	-	-	-	-	-	-
7	01	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan kantor	9 unit	0	-	-	-	-	-	-
7	01	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	1 unit	0	1 unit	1 unit	100	1 unit	2 unit	200%
7	01	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	60 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40%
7	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	60 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40%
7	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40%

1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7	01	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	60 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40%
7	01	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	116 unit	0	24 unit	24 unit	100	24 unit	48 unit	41.38%
7	01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	60 unit	0	12 unit	12 unit	100	12 unit	24 unit	40%
7	01	01	Pemeliharaan Meubel	Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala meubelair	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin / pemeliharaan peralatan perbaikan kerja	50 unit	0	10 unit	10 unit	100	10 unit	20 unit	40%
7	01	01	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6 unit	0	2 unit	2 unit	100	2 unit	4 unit	66.67%
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik								
7	01	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	25 jenis	0	5 jenis	5 jenis	100	5 jenis	10 jenis	40%
7	01	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	25 jenis	0	5 jenis	5 jenis	100	5 jenis	10 jenis	40%
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah								
7	01	05	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	10 kegiatan	0	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	4 kegiatan	40%

1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7	01	05	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Hari Jadi, HUT RI, Malam Tasyakuran)	10 kegiatan	0	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	4 kegiatan	40%
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa								
7	01	06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan								
7	01	06	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	55 desa	0	11 desa	11 desa	100	11 desa	22 desa	40%
7	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	11 desa	0	-	-	-	-	-	-
7	01	06	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	4 kegiatan	0	-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	25%
7	01	06	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	10 dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4 dokumen	40%
7	01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	5 kegiatan	0	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	2 kegiatan	40%

1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7	01	06	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	10 kegiatan	0	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	4 kegiatan	40%
7	01	06	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pem berdayaan masyarakat desa (pembinaan BUMDes, UKS, PKK dan Sosmasy)	20 kegiatan	0	4 kegiatan	4 kegiatan	100	4 kegiatan	8 kegiatan	40%
7	01	06	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2Kdes dan Sembako)	10 kegiatan	0	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	4 kegiatan	40%

B. Kajian Terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dijelaskan bahwa fungsi dari kecamatan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen kepada Camat, kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Poncowarno, namun secara umum pelayanan di Kecamatan Poncowarno dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada dinas instansi yang berada di wilayah kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen;
4. Pelayanan kepada pemerintahan desa dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan, dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno
Kabupaten Kebumen

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	85,00	86,00	87,00	88,00	86,53	87,00	87,00	88,00	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Poncowarno	-	-	85,00	86,00	87,00	88,00	86,53	87,00	87,00	88,00	

Dari Tabel 2.4 di atas target IKM Tahun 2022 sebesar 85,00 dengan capaian realisasi 86,53 ini menunjukkan capaian yang baik tentunya dengan didukung adanya ruang pelayanan publik yang nyaman ditambah dengan fasilitas ruang laktasi dan arena bermain anak.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Poncowarno

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Poncowarno sampai dengan Tahun 2022 telah dilaksanakan secara cukup optimal, yaitu dengan mendekatinya persentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam renstra. Walaupun demikian masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Poncowarno, yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya fungsi desa sebagai unit kerja yang langsung berhubungan dengan masyarakat serta sumber data dan informasi bagi perencanaan yang akan datang;
2. Belum optimalnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi. Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbagai teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Sampai Tahun 2022, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Kebumen masih belum berjalan optimal sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi yang lebih.
3. Data administrasi penduduk di RT/ RW kurang lengkap dan tidak sinkron dengan data yang ada;
4. Permodalan pelaku usaha kecil/koperasi/BUMDes;
5. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Poncowarno yang berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - a. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa sebagai penunjang pelayanan;
 - b. Implementasi pelimpahan kewenangan kepada camat belum semuanya diikuti dengan peraturan atau kebijakan pendukung lainnya sehingga proses pelayanan tidak berjalan efektif;
 - c. Belum memadainya kualitas dan kuantitas pelaksana teknis pelayanan PATEN;
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PATEN belum optimal.
6. Permasalahan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD): Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD dan DD mayoritas desa masih mengalami keterlambatan pada setiap pelaporannya. Upaya yang dilakukan adalah mengenai redaksi penyusunan laporan pertanggung jawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kebumen dengan melakukan pembinaan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, dan bimbingan teknis proses penyusunan laporan pertanggung jawaban ADD dan DD agar tepat waktu dan akuntabel. Namun secara umum pelaksanaan ADD dan DD di Kecamatan Poncowarno tidak ada permasalahan.
7. Permasalahan Perangkat Desa, masih perlu peningkatan SDM Perangkat Desa serta sarana prasarana yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat berjalan efektif dan efisien;
8. Strategi dalam pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibagi menjadi dua bagian, pertama melindungi keluarga dan masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara dan yang

kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi dan upaya tersebut selanjutnya dituangkan dalam beberapa program yang diarahkan pada penduduk miskin yaitu penyediaan bahan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha. Upaya pemerintah memiliki beberapa sistem yaitu perlindungan sosial, identifikasi dan penilaian penerima manfaat melalui program data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan dalam mengurangi dampak sosial ekonomi di masa pandemi, program keluarga harapan (PKH), memperluas cakupan program sembako serta menyalurkan program bantuan tunai maupun BLT yang bersumber dari Dana Desa.

9. Isu stunting di Kecamatan Poncowarno.

Stunting merupakan masalah kurang gizi pada pertumbuhan anak yang tidak sesuai rata-rata pertumbuhan yang normal. Di Kecamatan Poncowarno pada Tahun 2022 terdapat 168 anak yang stunting, turun 13.40% dari tahun sebelumnya sebanyak 194 anak. Untuk itu dilakukan konvergensi stunting yakni program nasional yang menjadi kewenangan desa. Melalui dana desa kegiatan tersebut harus dilaksanakan di setiap tahun anggaran. Adapun pencegahan stunting sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan kehamilan secara rutin
- b. Memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil
- c. Pemberian ASI eksklusif
- d. Menciptakan lingkungan yang bersih
- e. Memberikan MP ASI yang sehat
- f. Konsisten memantau tumbuh kembang anak
- g. Pemberian imunisasi lengkap

D. Review Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Poncowarno

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kecamatan Poncowarno dan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Renja tersebut memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang mana merupakan tolok ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen. Dokumen tersebut juga mengandung informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya dan keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Poncowarno.

Rancangan awal penyusunan RKPD Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 terdiri atas 4 program, 9 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan pagu indikatif Rp.1.620.578.952,00 (*satu milyar enam ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah*) sebagaimana Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kebumen

Kecamatan Poncowarno

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan/ sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program Kegiatan/ sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN PONCOWARNO				1.620.578.952	KECAMATAN PONCOWARNO				2.726.447.622	
	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.454.318.592	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.465.930.482	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	11 dokumen 11 dokumen	9.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	11 dokumen 11 dokumen	9.000.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Poncowarno	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Poncowarno	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	4.000.000	

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ponco warno	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ponco warno	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 laporan	5.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	1.250.988.912	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan 12 bulan	1.250.988.912	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ponco warno	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	16 orang/bulan	1.234.383.912	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ponco warno	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 orang/bulan	1.234.383.912	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Ponco warno	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	4 dokumen	16.605.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Ponco warno	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	4 dokumen	16.605.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	49.966.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	49.966.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Kec. Ponco	Jumlah paket komponen instalasi	1 paket	1.400.000	Penyediaan Komponen	Kec. Ponco	Jumlah paket komponen	1 paket	1.400.000	

	Penerangan Bangunan Kantor	warno	listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan			Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	warno	instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan			
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	26.235.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	26.235.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Ponco warno	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	8.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Ponco warno	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	8.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ponco warno	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2.250.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ponco warno	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2.250.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Kec. Ponco warno	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	12 paket	8.081.000	Penyediaan Bahan/ Material	Kec. Ponco warno	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	12 paket	8.081.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ponco warno	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	4.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ponco warno	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	4.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	6 unit	11.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah		Jumlah unit pengadaan barang milik	6 unit	11.000.000	

	Pemerintah Daerah		penunjang urusan pemerintah daerah			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ponco warno	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 paket 3 unit	11.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ponco warno	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 paket	11.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	83.048.680	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	85.084.570	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ponco warno	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	550.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ponco warno	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	550.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ponco warno	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	52.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ponco warno	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	52.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	30.498.680	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan	12 laporan	32.534.570	

								umum kantor yang disediakan			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	24 unit	50.315.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	24 unit	59.891.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kec. Ponco warno	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	23.315.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kec. Ponco warno	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	32.891.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ponco warno	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	2.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ponco warno	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	2.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Ponco warno	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	25.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Ponco warno	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	25.000.000	
7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	87%	53.437.360	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	87%	1.147.694.140	

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	53.437.360	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	1.147.694.140	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kec. Ponco warno	Jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan	12 laporan	53.437.360	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kec. Ponco warno	Jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan	12 laporan	57.509.140	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Ponco warno	Jumlah laporan pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	1 laporan	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Ponco warno	Jumlah laporan pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	1 laporan	1.090.185.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	12.433.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	12.433.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI	2 kegiatan	12.433.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI	2 kegiatan	12.433.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Kec. Ponco warno	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila	50 orang	12.433.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila	Kec. Ponco warno	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	50 orang	12.433.000	

	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI		Nasional dalam rangka Memantapkan Pengmalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	34,04%	100.390.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	34,04%	100.390.000	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	9 kegiatan	100.390.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	9 kegiatan	100.390.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Kec. Ponco warno	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	2 dokumen	15.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Ponco warno	Jumlah dokumen yang difasilitasi	2 dokumen	15.000.000	

	Desa		pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			dan Pendayagunaan Aset Desa		dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa			
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Ponco warno	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 dokumen	10.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Ponco warno	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 dokumen	10.000.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ponco warno	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 dokumen	15.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ponco warno	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 dokumen	15.000.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Ponco warno	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	1 dokumen	20.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Ponco warno	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	1 dokumen	20.000.000	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Ponco warno	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	4 dokumen	30.390.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Ponco warno	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	4 dokumen	30.390.000	

7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Ponco warno	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	1 laporan	10.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Ponco warno	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	1 laporan	10.000.000	
-----------------	--	------------------------	--	-----------	------------	---	------------------------	--	-----------	------------	--

Hasil analisa review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, mengalami perubahan mengingat pagu anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Poncowarno menyesuaikan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Poncowarno diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrenbangdes) hingga musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2022. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan desa memfasilitasi serta mengakomodir usulan kebutuhan masyarakat. Berikut ini disajikan tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Poncowarno:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Kebumen
(Usulan Prioritas Kecamatan Tahun 2024 sebagai Usulan Dana Afirmasi
Pengembangan Agrobisnis Terpadu Tahun 2024)

Kecamatan Poncowarno

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	OPD
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
	Kegiatan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Kecamatan Poncowarno			
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 1. Pisang Bibit, Saprodi, Pelatihan Budidaya, Cultivator, Hanspayer 2. Salak Bibit, Saprodi, Cultivator, Hanspayer, Pelatihan Budidaya 3. Pelatihan Pupuk Organik	Desa Lerepkebumen Desa Tirtomoyo	244.723.000	
2.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 1. Pisang Pelatihan pengolahan (plus study banding) 50 orang dan peralatan 1 desa	Desa Lerepkebumen	247.000.000	

	2. Salak Pelatihan pengolahan (plus study banding) dan peralatan 1 desa	Desa Tirtomoyo		
	3. Unit Pengolahan Hasil 1 unit untuk 2 desa	Desa Tirtomoyo		
	4. Prioritas alat dan pelatihan study banding			
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) JIAT 1 unit	Desa Blater	120.000.000	

Tabel 2.7
Daftar Usulan Prioritas Desa yang Akan Diusulkan ke Perangkat Daerah
Kecamatan Poncowarno Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	OPD
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Pembangunan Jalan Poros Desa menuju standar sepanjang 3 km (ruas jalan desa)	Desa Jatipurus	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa sejumlah 2 unit	Desa Jembangan	400.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.	Pembangunan Drainase sepanjang 500 m	Desa Karangtengah	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Desa Kedungdowo	40.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
5.	Pembangunan saluran Drainase 150 m dan gorong-gorong 6 m x 0.8 m (plat deker 6 x 1 m)	Desa Lerep kebumen	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang 200 m	Desa Poncowarno	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
7.	Pemeliharaan jalan kabupaten 1 paket	Desa Soka	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang 200 m	Desa Tegalrejo	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
9.	Pembangunan jalan utama kabupaten	Desa Lerep kebumen, Tirtomoyo, Karangtengah, Kebapangan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10.	Pelatihan Mitigasi Bencana			BPBD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Visi dan misi Kecamatan Poncowarno berpedoman dan sinkron dengan Visi dan Misi Kabupaten Kebumen 2021-2026. Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 adalah: “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati serta hasil analisa isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dapat diuraikan bahwa isi-isu strategis yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Poncowarno adalah: “Belum optimalnya implementasi *Clean and Good Governance*.”

Semua program dan kegiatan di Kecamatan Poncowarno dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam hal ini, pegawai adalah sebagai sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen dan berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Program dan kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Poncowarno yang mandiri, sejahtera, dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.

Misi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Poncowarno adalah Misi 1 (satu), yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov dan open gov*” yang berintegrasi dengan program-program unggulan yang meliputi :

1. GO-LAK, Jemput ke rumah layanan Administrasi Kependudukan Program Pelayanan Administrasi Kependudukan jemput bola ke rumah “ora antri, ora suwe, cepet dadi”.
2. Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP)
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan diantaranya pelayanan non perijinan yaitu : layanan pembuatan KTP elektronik, layanan Kartu Keluarga, layanan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan, layanan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan, layanan akta kelahiran, layanan legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), layanan rekomendasi/dispensasi surat nikah, dan layanan rekomendasi keterangan ahli waris.
3. Festival Anggaran
Festival anggaran merupakan bentuk komitmen peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dimana pelaksanaan fungsi pengawasan bersama-sama dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Melalui Festival Anggaran pemerintah Kabupaten Kebumen mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi penggunaan anggaran.
4. Satu Data Untuk Semua
Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.

B. Tujuan dan Sasaran Renja

Berdasarkan rumusan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026, maka tujuan dari Kecamatan Poncowarno adalah “Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik”. Sementara sasarannya adalah meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Poncowarno

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Tahun Ke				Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks	83,92	84,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
2.		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan		Indeks	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00

Sumber : RPJMD Kab. Kebumen 2021 - 2026

C. Program dan Kegiatan

1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Poncowarno secara keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan tersebut juga merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Poncowarno adalah sebagai berikut:

- 1) Transparansi informasi melalui media elektronik dituntut harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- 2) Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
- 3) Kepemimpinan berjalan efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan optimal;
- 4) Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
- 5) Masyarakat terlibat dalam pemberdayaan melalui kegiatan perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa dan program kegiatan pembangunan melalui padat karya terpadu.

b. Pencapaian SDG's

Dengan melaksanakan sosialisasi kepada desa/ lembaga untuk peserta rapat/kegiatan melibatkan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Di Kecamatan Poncowarno sudah melaksanakan di setiap rapat/ kegiatan.

c. Pengentasan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kebumen. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Poncowarno. Pada Tahun 2024, Kecamatan Poncowarno merencanakan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Strategi dalam pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibagi menjadi dua bagian, pertama melindungi keluarga dan masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara dan yang kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi dan upaya tersebut selanjutnya dituangkan dalam beberapa program yang diarahkan pada penduduk miskin yaitu penyediaan bahan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha. Upaya pemerintah memiliki beberapa sistem yaitu perlindungan sosial, identifikasi dan penilaian penerima manfaat melalui program data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan dalam mengurangi dampak sosial ekonomi di masa pandemi, program keluarga harapan (PKH), memperluas cakupan program sembako serta menyalurkan program bantuan tunai maupun BLT yang bersumber dari Dana Desa.

d. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dalam rumusan program dan kegiatan Tahun 2024, Kecamatan Poncowarno mengusung program koordinasi tingkat kecamatan dengan kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang

pembangunan sebagai upaya menggali/mendorong potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Poncowarno.

Kecamatan Poncowarno memiliki banyak potensi ekonomi baik yang bersumber dari potensi pasar lokal, hasil bumi dari pertanian masyarakat, dan sumberdaya wisata alam yang tersebar di seluruh sudut wilayah (contohnya Jembangan Wisata Air, Kedungdowo Adventure Park, Wisata Alam Prabu dll). Industri kecil di wilayah Kecamatan Poncowarno antara lain manisan salak, jenang salak, sambal salak, sriping singkong, sriping talas, opak singkong, dll. Bila seluruh sumber daya ini mampu dikelola secara maksimal maka niscaya akan mendorong pesat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan desa-desa di Poncowarno dapat menuju kepada konsep Desa Mandiri.

e. Prioritas APBDes Tahun Anggaran 2024

Melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2024 diprioritaskan untuk pencapaian SDG's Desa yang mengukur seluruh aspek pembangunan, sehingga mampu mewujudkan perkembangan manusia seutuhnya. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kecamatan Poncowarno Tahun Anggaran 2024 seluruh desa telah menganggarkan untuk anggaran SDG's.

f. Pendayagunaan BUMDES

Di Kecamatan Poncowarno, terdapat 3 (tiga) Badan Usaha Milik Desa yang sudah mulai berkembang usahanya, yakni 1) BUMDes Tegalrejo dengan bentuk usahanya kios pertanian dan pengelolaan pasar desa; 2) BUMDes Tirtomoyo dengan bentuk usaha pengelola Wisata Alam Prabu (WAP) dan pengelola air minum isi ulang Prabu; dan 3) BUMDes Poncowarno dengan bentuk usaha pengelola Pertashop dan percetakan.

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 adalah 4 (empat) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan didalamnya.

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Poncowarno sifat penyebarannya adalah di seluruh wilayah Kecamatan Poncowarno, meliputi semua desa yang ada di Kecamatan Poncowarno dan juga Kantor Kecamatan Poncowarno sendiri, serta beberapa lokasi luar daerah serta di wilayah Kabupaten Kebumen.

c. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.722.743.000,00 (*dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Poncowarno
Tahun 2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Bahan/Material
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Pencapaian IKM Kecamatan Poncowarno sesuai Perda RPJMD, dan Rancangan Akhir Renstra 2021–2026 tertuang pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
IKM Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target				
			2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Poncowarno	Indeks	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen 2021-2026, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat” ditempuh melalui lima misi. Oleh karena itu, untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Kebumen ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, maka dapat ditelaah dari Misi ke-1 (satu) yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi”.

A. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Prioritas pendanaan di Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 memperhatikan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026, Capaian RKPD Tahun 2022 dan mengakomodir beberapa isu strategis yang dapat dicapai. Rencana kerja dan kegiatan prioritas Kecamatan Poncowarno yang mendukung prioritas Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Ket.
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	1.465.930.482	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.250.988.912	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.966.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.084.570	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.891.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.147.694.140	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.147.694.140	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.433.000	

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Ket.
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.433.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100.390.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.390.000	
	JUMLAH PAGU	2.726.447.622	

B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, data Tabel 4.2. sebagai berikut:

**Tabel 4.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
serta Prakiraan Maju Kecamatan Poncowarno Tahun 2024**

Nama OPD : Kecamatan Poncowarno

lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01	KECAMATAN							
7	01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	87%	1.147.694.140			87%	1.158.000.000
7	01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	1.147.694.140	DAU		100%	1.158.000.000
7	01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan	Kecamatan Poncowarno	12 laporan	57.509.140	DAU	12 laporan	58.000.000
7	01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Poncowarno	1 laporan	1.090.185.000			1.100.000.000
7	01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	12.433.000			100%	21.750.000
7	01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI		2 kegiatan	12.433.000		2 kegiatan	21.750.000
7	01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Kecamatan Poncowarno	50 orang	12.433.000	DAU	50 orang	21.750.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri		34,04%	100.390.000			34,04%	133.728.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah		9 kegiatan	100.390.000			9 kegiatan	133.728.000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Poncowarno	2 dokumen	15.000.000	DAU		2 dokumen	22.000.000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kecamatan Poncowarno	2 dokumen	10.000.000	DAU		2 dokumen	15.000.000
7	01	01	2.01	011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Poncowarno	1 dokumen	15.000.000	DAU		1 dokumen	22.000.000
7	01	01	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	Kecamatan Poncowarno	1 dokumen	20.000.000	DAU		1 dokumen	26.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	01	2.01	016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kecamatan Poncowarno	4 dokumen	30.390.000	DAU		4 dokumen	35.000.000
7	01	01	2.01	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kecamatan Poncowarno	1 laporan	10.000.000	DAU		1 laporan	13.728.000
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1.465.930.482			100%	1.713.206.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun		11 dokumen 11 dokumen	9.000.000			11 dokumen 11 dokumen	11.000.000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Poncowarno	5 dokumen	4.000.000	DAU		5 dokumen	6.000.000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Poncowarno	6 laporan	5.000.000	DAU		6 laporan	5.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah		12 bulan 12 bulan	1.250.988.912			12 bulan 12 bulan	1.529.969.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Poncowarno	16 orang/bulan	1.234.383.912	DAU		16 orang/bulan	1.510.969.000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Kecamatan Poncowarno	4 dokumen	16.605.000	DAU		4 dokumen	19.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah		12 bulan	49.966.000			12 bulan	34.237.000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan Poncowarno	1 paket	1.400.000	DAU		1 paket	1.750.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan Poncowarno	1 paket	26.235.000	DAU		1 paket	10.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan Poncowarno	2 paket	8.000.000	DAU		2 paket	8.000.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan Poncowarno	12 dokumen	2.250.000	DAU		12 dokumen	2.250.000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	Kecamatan Poncowarno	12 paket	8.081.000	DAU		12 paket	8.237.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Poncowarno	1 laporan	4.000.000	DAU		1 laporan	4.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		6 unit	11.000.000				25.000.000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kecamatan Poncowarno	3 unit	11.000.000	DAU		3 unit	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		12 bulan	85.084.570				88.000.000
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Poncowarno	12 laporan	550.000	DAU		12 laporan	1.000.000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kecamatan Poncowarno	12 laporan	52.000.000	DAU		12 laporan	53.000.000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kecamatan Poncowarno	12 laporan	30.500.000	DAU		12 laporan	34.000.000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		24 unit	59.891.000			24 unit	25.000.000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kecamatan Poncowarno	12 unit	32.891.000	DAU		12 unit	23.000.000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kecamatan Poncowarno	10 unit	2.000.000	DAU		10 unit	2.000.000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kecamatan Poncowarno	2 unit	25.000.000	DAU			0
					TOTAL	2.726.447.622			3.026.684.000

BAB V PENUTUP

A. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Poncowarno berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan ditahun pertama yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 – 2026. Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berfikir sistematis/rasional, produktif, bekerja efisien dan efektif.

Renja PD Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 memiliki kedudukan strategis yang menghubungkan antara perencanaan di Kecamatan Poncowarno dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024, serta keterkaitan dengan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Kemudian, Renja PD Kecamatan Poncowarno ini digunakan sebagai pedoman dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Poncowarno pada Tahun 2024.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Poncowarno pada Tahun 2024, antara lain (a) peningkatan kesejahteraan masyarakat Poncowarno, (b) peningkatan dalam proses pelayanan di kecamatan dan desa, (c) pembinaan kepada perangkat desa, (d) implementasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran, (e) mengoptimalkan monitoring dan evaluasi, dan (f) pemutakhiran IDM berbasis SDG's. Hal-hal tersebut perlu diperhatikan supaya dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal. Apabila ketersediaan anggaran tidak tercukupi, program dan kegiatan tersebut dianggarkan kembali pada Renja PD tahun berikutnya.

Renja Kecamatan Poncowarno selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Poncowarno. Selanjutnya Renja juga memberikan umpan balik (feed back) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Kecamatan Poncowarno berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 dan diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Kecamatan Poncowarno berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.

C. Rencana Tindak Lanjut

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dalam Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 ini mendapatkan alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.726.447.622,00 (*dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah*) yang terdiri dari 4 (empat) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan. Rencana ini merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Semoga keberadaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Poncowarno ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Poncowarno serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 7 Agustus 2023

CAMAT PONCOWARNO,



Julianus STP. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197912211999121001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Cahyo Riyadi	
Tan Khid	

LAMPIRAN

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PONCOWARNO KAB. KEBUMEN
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PONCOWARNO						2.726.447.622,00						3.026.684.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.482.937.912,00							1.776.684.000,00	
	7.01	KECAMATAN						82.433.000,00							120.478.000,00	
1.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Indeks Kondusivitas Kecamatan</i>	-			100 %	12.433.000,00						-	21.750.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi kebumen dan HUT RI</i>	-			2 Kegiatan	12.433.000,00			-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kantor Kecamatan Poncowarno	-	21.750.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>				50 Orang	12.433.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kantor Kecamatan Poncowarno		21.750.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
2.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri</i>	-			34,04 %	70.000.000,00						-	98.728.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan</i>	-			9 Kegiatan	70.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kantor Kecamatan Poncowarno	-	98.728.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kantor Kecamatan Poncowarno		22.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kantor Kecamatan Poncowarno		15.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kantor Kecamatan Poncowarno		22.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kantor Kecamatan Poncowarno		26.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kantor Kecamatan Poncowarno		13.728.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.400.504.912,00							1.656.206.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	1.400.504.912,00						-	1.656.206.000,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun</i> <i>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun</i>	-			11 dokumen 11 Dokumen	9.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	11.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		6.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		5.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah</i> <i>Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-			12 bulan 12 bulan	1.250.988.912,00			-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	1.529.969.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				16 Orang/bulan	1.234.383.912,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		1.510.969.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	16.605.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		19.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	49.966.000,00			-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	34.237.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.400.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		1.750.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.235.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		10.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		8.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.250.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		2.250.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	8.081.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		8.237.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		4.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			6 Unit	11.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	11.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		25.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			12 Bulan	52.550.000,00			-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	54.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	550.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		1.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	52.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		53.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			24 Unit	27.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		2.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	-	-						1.243.509.710,00							1.250.000.000,00	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			12 Bulan	32.534.570,00			-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	34.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	32.534.570,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		34.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			24 Unit	32.891.000,00			-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	23.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	32.891.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		23.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI						1.178.084.140,00							1.193.000.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	1.147.694.140,00						-	1.158.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	1.147.694.140,00			-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	1.158.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>				12 Laporan	57.509.140,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		58.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				1 Laporan	1.090.185.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		1.100.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
2.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	-			34,04 %	30.390.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan</i>	-			9 Kegiatan	30.390.000,00			-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	35.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>				4 Dokumen	30.390.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		35.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
J U M L A H								2.726.447.622,00							3.026.684.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO
Jl. Raya Poncowarno Km - 1 ☎ (0287) 5505279
Kode Pos 54471

Poncowarno, 16 November 2022

Nomor : 005/1168
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Undangan Musrenbang

Kepada :
Yth. 1 Kapolsek Poncowarno;
2 Danposramil Poncowarno,
3 Kepala KUA Poncowarno,
4 Kepala Puskesmas Poncowarno,
5 Kepala UPTD PJI Kaligending,
6 Koordinator BPP Kecamatan
Poncowarno,
7 Ketua TP PKK
Kec Poncowarno ,
8 Kepala Desa
Se-Kecamatan Poncowarno ,
9.

di -

Tempat

Mengharapkan dengan hormat kehadirannya, besok pada :

Hari/tanggal : Rabu, 23 November 2022
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Pendopo Kecamatan Poncowarno
Acara : Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tahun 2022
Keterangan : 1. Hadir tepat waktu,
2. Mematuhi protokol kesehatan (memakai masker);
3. Kepala Desa hadir bersama Tim Delegasi Desa 5 (lima) Orang.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya diucapkan terimakasih

CAMAT PONCOWARNO

JULIN, S. STP, M. Si

Penibina Tk. I

NIP 197912211999121001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Kebumen (sebagai laporan),
2. Kepala Bapeda Kabupaten Kebumen,
3. Kepala Dispermades Kabupaten Kebumen,
4. Arsip

DAFTAR PESERTA MUSRENBANG RKPJ KABUPATEN DI KLUMATA

1. Kapolsek Poncowarno;
2. Danposramil Poncowarno;
3. Kepala KUA Poncowarno;
4. Kepala Puskesmas Poncowarno;
5. Kepala DPUPR Kab. Kebumen;
6. Koordinator BPP Kecamatan Poncowarno;
7. Ketua TP PKK Kec Poncowarno ;
8. Kepala Desa Se-Kecamatan Poncowarno ;
9. PPL Perikanan Kec.Poncowarno;
10. Penyuluh Peternakan;
11. Forum Anak Kecamatan Kec.Poncowarno;
12. Keterwakilan Disabilitas Kec.Poncowarno;
13. Pendamping Desa dan PLD,
14. Koordinator PKH dan TKSK ;
15. Koordinator PPKB;
16. DPRD;
17. Ketua Bumdesma;
18. Kepala BPBD Kabupaten Kebumen;
19. Tim Kabupaten;

**Daftar Hadir Peserta Musrenbangcam Kecamatan Poncowarno
Tahun 2022**

Hari/tanggal : Rabu, 23 November 2022
 Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Pendopo Kecamatan Poncowarno

No.	Nama	Jenis Kelamin		Lembaga/Instansi	Alamat Dan No Telp/HP	Tanda Tangan
		L	P			
1	MUGI-JONO	L		KAPOLSEK		1
2	DAR-JANTO	L		POSRAMIL		2
3	ANA .W	L				3
4	SABANDRIO	L		POLSEK		4
5	SRI Maryuti		P	BPP Poncowarno	0857257521511	5
6	Anis Nurul H	L		TKSK Poncowarno	087821072000	6
7	Joko Sriwandi	L		BUMDESMA	085 273 037 169	7
8	Wagiran	L		DPK Kuto	Kulwinargo.	8
9	Intan Nurani		P	SMP Poncowarno	0812 8198 1355	9
10	ISARI W	L		SMP Poncowarno	0857 0187 8471	10
11	SARBIMU	L		Koordinator Kalsig		11
12	BAHRUN M	L		BAPEDA	081327000747	12
13	TOTOLO	L		BPPD	0812575128	13
14	Sumaryah		✓	PKH Kecamatan	lancaran 085702	14
15	CASALWAL	L		ISPBD	085640551129	15
16	ANUS P	L		Bappeda		16
17	Mustahil	L		BKPH		17
18	FQIZ Riyadi	L		RUA Poncowarno	081327279814	18
19	Budi Santoso	L		Penguluh Perikanan	085211442933	19
20	TRI Istari		✓	Puskemas Ponda	085291909028	20
21	Seincard	L		Sty WPKly		21
22	Ryza A.		P	BP KB Poncowarno	085643335927	22
23	Susyanto	L		Kec. Poncowarno	0878 2213.6998	23
24	Priharyati		P	Kec. Poncowarno		24
25	Feluziah Tri H		P	Kec. Poncowarno		25
26	Laela		P	Kec. Poncowarno		26
27	Endra S Asraf	L		"		27
28	Nurjanah		P	Kec. Poncowarno		28
29	Maikh. TOTIN	L		"		29
30	NURWAN	L		Kec	081327629510	30
31	Suryantoro	L		"		31

32	Piji Suhartini		P	P.LD ker. Puncowarno	08788905935	32
33	A. Zenasin	L		Ang. Dis. Puncowarno	0853854 67077	33
34	M. Maroul	L				34
35	Muhammad Sabir	L				35
36	Adi Bentoro					36
37	Munarto	L		Kec. Puncowarno		37
38	Wahid	L			087728667720	38
39	Darmiyati		P			39
40	Istikomah		P	Kec. Puncowarno		40
41						41
42						42
43						43
44						44

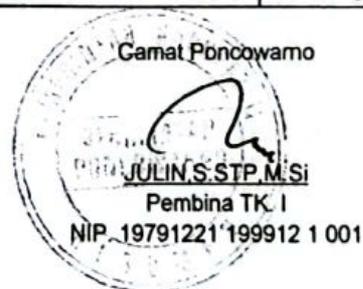

 Camat Puncowarno
 JULIN S. STP. M. Si
 Pembina TK. I
 NIP. 19791221-199912 1 001

**Daftar Hadir Peserta Musrenbangcam Kecamatan Poncowarno
Tahun 2022**

Hari/tanggal : Rabu, 23 November 2022
 Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Pendopo Kecamatan Poncowarno

No.	Nama	Jenis Kelamin		Lembaga/Instansi	Alamat Dan No Telp/HP	Tanda Tangan
		L	P			
1	Soban	✓		Desa Jatipurus		1
2	Muslihudin	✓				2
3	Makmun	L				3
4	Siti Anuroh		P			4 JM
5	Sri Poncowati		P			5 Coi
6	Siti Maryamah		P			6
7	Sai wahyuning Sih		P	Desa Lerepkebumen		7 JM
8	MUKHIA Dim	L				8
9	Ali Purah	L				9 M
10	Mulyono	L		Kedes		10 K
11	Siti Wicakingsih	P	P			11
12	Sapto W	L				12 JM
13	Gurpo N	L		Desa Blater		13
14	Rasy J.N	L				14 JM
15	Muslihudin	L				15 JM
16	Amir Mahmud	L				16 JM
17	Siti Rochyat		P			17 JM
18	Hasim Asngar	L				18 JM
19	Desi Iffis	L		Desa Poncowarno		19
20	Agus Susiko	L				20 JM
21	Purwadi	L				21 JM
22	Surojipato	L				22 JM
23	Asni Furaidi		P			23 JM
24	M. Nuzulhu F		P			24 JM
25	Indro H	L		Desa Tegalrejo		25 JM
26	INDRO	L				26 JM
27	ep. Nurbaek		P			27 JM
28	Wanyuniani		P			28 JM
29	Mudri	L				29 JM
30	Tri Fillionch		P			30 JM
31	MUHOLIS	L		Desa Jembangan		31 JM
32	M. ALI AS'AD	L				32 JM
33	Titi wahyuni		P			33 JM
34	Santi wan	L				34 JM
35	Sulastri		P			35 JM
36	Pumijo	L				36 JM

No.	Nama	Jenis Kelamin		Lembaga/Instansi	Alamat Dan No Telp/HP	Tanda Tangan
		L	P			
37	Supriyanto . S	L		Desa Kedungdowo		37
38	Tambar S.	L				38
39	Winarto	L				39
40	Sungkono	L				40
41	Sariyem		P			41
42	Jemahil		P			42
43	Stapatno			Desa Karangtengah		43
44	Slo met. lu	L				44
45	Umi Widiyastuti		P			45
46	Teguh Budi P.	L				46
47	Ngatijan	L				47
48	Dwi Retno		P			48
49	WARIS			Desa Kebapangan		49
50	Miad	r				50
51	Tarni		P			51
52	AS Mumpu	L				52
53	Slamet	L				53
54	HEMARI YULIYANTO	L				54
55	Masrubhan	L		Desa Tirtomoyo		55
56	Nagam	L		padus		56
57	Dian Ekawati		P	TP. PKK		57
58	Akhmad Khanisun	L		Bunder		58
59	Nurul H		P			59
60	Siti Rokhwati		P			60
61	Fatkhul Mubin	L		Desa Soka		61
62	Wulandari		P			62
63	Darmastuti		P			63
64	Khutubi	L				64
65	Mukhori	L				65
66	Miftahudin	L				66





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN PONCOWARNO

Jl. Raya Poncowarno Km - 1 ☎ (0287) 5505279

Kode Pos 54471

NOTULEN

I. Dasar

1. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
2. Surat Camat Poncowarno Nomor 005/1168 tanggal 14 November 2022 perihal Undangan (Kepada Forkompincam, UPT, Korwil dan Kepala Desa/Tim Delegasi);
3. Surat Camat Poncowarno Nomor 005/1174 tanggal 14 November 2022 perihal Undangan (Kepada Tim Fasilitator Musrenbang RKPd kabupaten dan anggota DPRD Kabupaten Kebumen Dapil 6).

II. Waktu dan Tempat Kegiatan

- Hari/tanggal : Rabu, 23 November 2022
Waktu : Pukul 09.00 s/d 13.30 WIB
Tempat : Pendopo Kecamatan Poncowarno
Kegiatan : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan RKPd Kabupaten Kebumen di Kecamatan Poncowarno Tahun 2024
Penyelenggara : Kecamatan Poncowarno
Nara Sumber : 1. Tim Monitoring Musrenbang RKPd Kabupaten Kebumen
Dihadiri oleh Dyah Mustika P,ST dari Bappeda
2. Kepala OPD yaitu dari DPUPR (Bidang Jalan) , Distapang (UPT Kecamatan , BPBD (Sekretaris BPBD)
3. Polsek Poncowarno
4. Koramil Poncowarno
5. Puskesmas Poncowarno
6. KUA Kecamatan Poncowarno
- Peserta : Delegasi Desa terdiri dari unsur Kepala Desa, BPD, lembaga, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan masing-masing 6 orang setiap Desa sebanyak total 66 orang dan Peserta dari Disabilitas, Forum Anak Kecamatan dan Lembaga Ketahanan masyarakat /Karangtaruna

III. Pelaksanaan Kegiatan :

Susunan Acara :

1. Pembukaan
2. -Menyanyikan Lagu Indonesia
-Menyanyikan Hymne Kebumen
3. Pembacaan doa
4. Sambutan Camat Poncowarno
5. Pemaparan Tim Penyelenggara oleh Ketua Penyelenggara (Nasrudin,S.IP,MM) tentang :
 - a. Daftar Prioritas Usulan Desa Tahun 2024 sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan tahun 2024 berdasarkan hasil perangkingan dari tabel perangkingan yang dikirimkan oleh delegasi Desa dan direkapitulasi oleh Tim Penyelenggara Musrenbang RKPd Kabupaten di Kecamatan

- b. Daftar Rencana Kegiatan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2024 berdasarkan Rencana Kegiatan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2023 untuk Kecamatan Poncowarno berupa Kegiatan pertanian dan budidaya Pisang dan salak 2 desa di Tirtomoyo dan Lerepkebumen dan JIAT dan Desa Blater
6. Penyepakatan Daftar Prioritas Usulan Desa Tahun 2022 sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah, dan Daftar Rencana Kegiatan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2024.
7. Pemilihan dan penetapan daftar nama delegasi kecamatan untuk menjadi peserta Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten, Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Kebumen di Kecamatan Poncowarno Tahun 2022.
Peserta Tim Delegasi Kecamatan sebagaimana terlampir.
8. Acara ditutup pada pukul 13.00 WIB

NOTULIS,



DARMIYATI, S.AP.

Penata Tk.I

NIP 196505092007012013

Notulen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Poncowarno

Hari/tanggal : Rabu, 23 November 2022

Waktu : Pukul 08.30 WIB

Tempat : Pendopo Kecamatan

1. Sambutan camat Poncowarno, Musrenbang RKPD Kabupaten yang dilaksanakan di Kec. Poncowarno tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka menyusun 10 usulan yang telah dipilih dan diharapkan sudah mengakomodir semua usulan dari semua desa dengan nanti ada usulan yang menjadi prioritas usulan Kecamatan. Termasuk juga dengan program DAPAT agar dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Pemaparan Ketua Tim Penyelenggara oleh bapak Sekcam Nasrudin terkait :
 - a. Usulan prioritas desa tahun 2024
 - b. Program DAPAT
3. Tanggapan dari BAPPEDA secara umum tahapan sudah dilaksanakan sesuai dengan runtutan. Mengharap agar 10 usulan prioritas tersebut agar disertai dengan proposal.
4. Tanggapan dari BPBD Kab. Kebumen bapak Puguh Sumbogo menghimbau agar masyarakat waspada dengan potensi bencana yang mungkin terjadi disekitar wilayah kita, Agar pemerintah desa mengalokasikan anggaran kedaruratan untuk penanganan bencana.
5. Tanggapan dari UPTD PJI Kaligending bahwa usulan sudah sesuai, diharapkan kerjasamanya dari tiap desa khususnya dalam pemeliharaan irigasinya.
6. Tanggapan dari BPP Pertanian ibu Sri Maryuti, Usulan dari desa kedungdowo dan Tegalrejo belum dicantumkan nominal anggarannya dan kelompok taninya. Untuk yang program DAPAT sama cantumkan kelompok pengelolanya dalam hal ini bisa dengan KWT (Kelompok Wanita Tani).
7. Tanggapan dari Kades Lerepkebumen bapak Muhyono, Ada kendala dari Usulan Saluran Drainase 150 m dan gorong-gorong 6 m x 0,8 m, (Plat Decker 6 m x 1 m) sebesar 200 jt yang terletal di dk. Bungas rt 01/04. Mohon agar dapat direalisasikan demi menjaga jalan poros kabupaten.
8. Tanggapan Kades Tirtomoyo, bapak Najam. Mohon Usulan Pembangunan Jalan Poros Kecamatan Lingkar Utara diberikan catatan khusus agar dapat segera direalisasi dibangun.
9. Tanggapan dari Bu Kades Tirtomoyo, Bagaimana pola marketing dari produk olahan yang kami kelola dengan adanya program DAPAT tersebut.
10. Tanggapan dari Kades Kebapangan bapak Slamet, Mohon agar Jalan poros yang atas SD N Kebapangan bisa dianggarkan terpisah supaya segera direalisasikan.
11. Tanggapan Balik dari camat Poncowarno : Prioritas tetap desa Kebapangan walaupun jalur ini juga melintasi beberapa desa.
12. Pemufakatan Hasil Musrembangcam oleh sekretaris Kecamatan bapak Nasrudin, dimana dalam hal ini mengatur prosedur proses pemufakatan dari tiap delegasi desa yang hadir.
13. Pemilihan delegasi untuk mengikuti Musrenbang RKPD di Kabupaten

Notulis



Darmiyati

Daftar Prioritas Usulan Desa Tahun 2024
sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Tahun 2024
yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah

No	Usulan	Alamat	Desa	SKPD Tujuan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)
1	Pembangunan Jalan Poros Desa Menuju Standar, sepanjang 3km Rp. 600.000.000,00 (Ruas Jalan Desa)	RW1 s/d RW 2, Kab. Kebumen	Jatipurus	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rekomendasi : bantuan semen untuk rabat beton Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
2	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa, Sejumlah Dua Unit. Senilai Anggaran Rp.400.000.000. (Empat RatusJuta Rupiah). diperuntukan kepada Kelompok Tani Sri Waluyaning Tani (Dk.Krajan Rt.03/Rw.01) dan Kelompok Tani Sri Rejeki (Dk.Pusung Rt.05 Rw.01) Untuk Mendukung Upaya Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian.	Desa Jembangan Kecamatan Poncowarno, Kab. Kebumen	Jembangan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN/ DPU PR	Rekomendasi : Dapat ditindaklanjuti selama memenuhi persyaratan teknis dan administratif Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
3	Pembangunan Drainase sepanjang 500 M Rp 400.000.000	Desa Karangtengah Kecamatan Poncowarno Kab Kebumen, Kab. Kebumen	Karangtengah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rekomendasi : bantuan bahan bangunan, pasangan batu, talud, bronjong drainase lingkungan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
4	Bantuan Pengisian lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Jumlah Rp.40.000.000	Dk Silengkong Rt 02/01, Kab. Kebumen	Kedungdowo	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Rekomendasi : Dapat ditindaklanjuti selama memenuhi persyaratan teknis dan administratif Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
5	Terbangunnya saluran Drainase 150 m dan Gorong-gorong 6m x 0,8 m , (Plat Deker 6 x 1m) Rp.200.000.000	Dk Bungas Rt 01 Rw 04, Kab. Kebumen	Lerepkebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rekomendasi : bantuan bahan bangunan, pasangan batu, talud, bronjong drainase Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

No	Usulan	Alamat	Kelurahan	SKPD Tujuan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)
6	Pembangunan Jalan Usaha Tani agar akses ke lahan pertanian mudah diakses sepanjang 200 meter Rp 200.000.000	DK Geger Rt 3 RW 2 Desa Poncowarno kec. Poncowarno. Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	Poncowarno	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Rekomendasi : Dapat ditindaklanjuti selama memenuhi persyaratan teknis dan administratif Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
7	Program penyelenggaraan jalan poros Kabupaten, dibutuhkan kegiatan berupa pemeliharaan jalan Kabupaten dengan kebutuhan 1 paket dan besar anggaran 200.000.000	Desa Soka Kecamatan Poncowarno, Kab. Kebumen	Soka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rekomendasi : dapat diakomodir apabila masuk jalan kewenangan kabupaten Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
8	Belum adanya sarana penunjang pertanian berupa jalan usaha tani ukuran 200 m x 3 m jumlah Rp.200.000.000 (Gapoktan Purwotulodo)	Desa Tegalrejo, Kab. Kebumen	Tegalrejo	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Rekomendasi : Dapat ditindaklanjuti selama memenuhi persyaratan teknis dan administratif Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
9.	Pembangunan Jalan utama Kabupaten Desa Lerepkebumen , Tirtomoyo, Karangtengah, Kebapangan	Usulan Kecamatan	Kecamatan	DPU PR	
10.	Pelatihan Mitigasi Bencana	Usulan Kecamatan	Kecamatan	BPBD	

**USULAN PROGAM DANA AFIRMASI PENGEMBANGAN AGROBISNIS TERPADU (DAPAT)
KECAMATAN PONCOWARNO
TAHUN 2024**

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
1. Pisang : Bibit, saprodi, pelatihan budidaya, cultivator, hanspayer desa lerepkebumen 2. Salak : Bibit, saprodi, cultivator, hanspayer, pelatihan budidaya untuk desa tirtomoyo 3. Pelatihan pupuk organik	244.723.000
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
1. Pisang : Pelatihan pengolahan (plus study banding) (50 org) dan peralatan 1 desa (desa lerep kebumen) 2. Salak : Pelatihan pengolahan (plus study banding) dan peralatan 1 desa (desa tirtomoyo) 3. Unit Pengolah Hasil 1 unit utk 2 desa berlokasi di desa tirtomoyo 4. prioritas alat dan pelatihan study banding menyesuaikan ketersediaan anggaran	247.000.000
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
JIAT 1 unit Lokasi : Desa Blater	120.000.000

DOKUMENTASI MUSRENBANG KECAMATAN PONCOWARNO TAHUN 2022



